

SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) PADA PRAKTEK PERIZINAN BERUSAHA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

Deola Adene

Abstrak

Dilandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, menjadi cikal bakal diaturnya *Online Single Submission* dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di sektor perizinan. Hal tersebut lebih diwujudkan dengan dikeluarkannya *Online single Submission* pada hari Senin tanggal 8 Juli 2018 lalu serta dikularkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *OSS* hadir sebagai sarana pelayanan publik yang menghubungkan antara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelaku usaha. *OSS* saat ini berada dalam naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) namun pengaturan regulasi masih dibawah naungan Kementrian Koordinasi bidang Perekonomian (Kemenko) . disisi lain, munculnya *OSS* diiringi berbagai kendala untuk oleh pemerintah, lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menangani berbagai kendala tersebut. Telah banyak kontroversi mengenai adanya *OSS* dalam praktek perizinan berusaha dan hingga saat ini pemerintah masih mengupayakan sistem *OSS* bekerja optimal. Hal tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji tentang *OSS* sebagai materi skripsi.

Kata Kunci: *Online Single Submission*, Pelayanan Publik, Perizinan.

**ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM ON
LICENSING PRACTICES IN BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL (BKPM)**

Deola Adene

Abstract

Based on Presidential Regulation Number 91 of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation, it is the forerunner to the regulation of Online Single Submission in the implementation of Public Services in the permits sector. This was further realized by the issuance of a single Online Submission on Monday July 8, 2018 and the Government Regulation Number 24 of 2018 concerning the Licensing of Business Licensing Services Integrated Electronically. OSS is present as a public service facility that connects the One Stop Integrated Services and business actors. OSS is currently under Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) but the regulatory arrangements are still under Kementrian Koordinasi bidang Perekonomian (Kemenko). on the other hand, the emergence of OSS was accompanied by various obstacles for the government, then how was the government's efforts in dealing with various obstacles. There has been a lot of controversy regarding the existence of OSS in the practice of permits and so far the government is still working on the OSS system to work optimally. This attracted the interest of the author to study OSS as a thesis material.

Keywords: Online Single Submission, Public Services, Permits.